Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 23155-23163
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Keadilan Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur

Putri Rahmawati[1], Lia Ekowati[2]
Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta
[1]putrirahmawati3668@gmail.com , [2]lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id

Abstrak

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta Timur seharusnya diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berstatus Belum Daftar Ulang (BDU) masih lebih tinggi dibandingkan kendaraan berstatus aktif, yang mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, keadilan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran PKB di Jakarta Timur, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling melalui metode purposive sampling. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Data yang memenuhi kriteria analisis berjumlah 104 responden. Data dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 27 dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial modernisasi sistem administrasi perpajakan dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PKB, sedangkan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PKB. Sementara itu, secara simultan modernisasi sistem administrasi perpajakan, keadilan pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PKB di Jakarta Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan sistem administrasi dan persepsi keadilan pajak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya melalui penguatan program sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak.

Kata Kunci: *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Keadilan Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.*

1. Latar Belakang

Salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik Adalah pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan [1] realisasi pendapatan negara tahun 2025 mencapai Rp2.756,3 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.217,9 triliun yang masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara maupun daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor sebagai jenis kendaraan dengan jumlah kepemilikan terbanyak di Indonesia [2], potensi penerimaan PKB juga seharusnya semakin meningkat.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, jumlah sepeda motor di Jakarta Timur terus mengalami peningkatan selama periode 2021-2025. Peningkatan tersebut menunjukkan besarnya potensi penerimaan PKB di wilayah tersebut. Namun, kondisi tersebut belum diikuti oleh meningkatnya kepatuhan pembayaran PKB. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, jumlah kendaraan bermotor yang berstatus Belum Daftar Ulang (BDU) masih lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang berstatus aktif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi penerimaan PKB yang belum dapat dioptimalkan sehingga

menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan jumlah kendaraan bermotor dengan tingkat kepatuhan pembayaran PKB.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor – Sepeda Motor Berdasarkan Status Aktif dan Belum Daftar Ulang (BDU) di Jakarta Timur Tahun 2021-2025

Tahun	Aktif (unit)	Pasif/BDU (unit)	Jumlah Sepeda Motor (unit)
2021	754.752	1.511.076	2.265.828
2022	780.049	1.558.386	2.338.435
2023	764.430	1.660.126	2.424.556
2024	736.191	1.768.538	2.504.729
2025	687.894	1.881.838	2.569.732

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kendaraan bermotor berstatus BDU masih lebih tinggi dibandingkan kendaraan berstatus aktif selama periode 2021-2025. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan pembayaran PKB masih belum optimal dan diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari sistem administrasi perpajakan maupun perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran PKB di Jakarta Timur.

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai landasan teori yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam membentuk niat individu untuk melakukan tindakan tertentu, yang pada akhirnya menentukan pelaksanaan perilaku tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior (TPB). TPB menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku memengaruhi perilaku individu. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam membentuk niat individu untuk melakukan tindakan tertentu, yang pada akhirnya menentukan pelaksanaan perilaku tersebut [3]. Individu yang memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya biasanya melakukannya dengan cara yang tepat [4]. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Dalam penelitian ini, modernisasi sistem administrasi perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal, sedangkan keadilan pajak dan kesadaran pajak dianggap sebagai faktor internal yang diduga memengaruhi kepatuhan pembayaran PKB.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan serta mengoptimalkan penerimaan pajak [5]. Modernisasi tersebut dilakukan melalui penyempurnaan sistem dan prosedur serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan sehingga proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan data perpajakan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

Menurut Nugaha dan Hajanirina (2020) [6], keadilan pajak merupakan tujuan hukum yang diwujudkan melalui penerapan undang-undang serta mekanisme pemungutan pajak yang dilaksanakan secara adil. Keadilan pajak tidak hanya berkaitan dengan besarnya beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak, tetapi juga mencakup penerapan aturan yang proporsional. Penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil serta memperkuat rasa percaya wajib pajak kepada pemerintah.

Kesadaran wajib pajak menurut Kowel *et al*. (2019) [7] merupakan keadaan ketika wajib pajak memahami hak serta kewajiban perpajakannya sebagai bagian dari tanggung jawab hukum. Kesadaran tersebut mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan bertanggung jawab tanpa adanya tekanan atau dorongan dari pihak lain. Selain berkaitan dengan pengetahuan mengenai hukum pajak, kesadaran wajib pajak juga mencerminkan kesiapan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi umumnya memahami bahwa pajak merupakan sumber utama pendanaan negara untuk berbagai kebutuhan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, keadilan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih menghasilkan temuan yang belum konsisten. Putri dan Rosyati [8] membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Lim dan Febriany [9] menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PKB. Fathurrahman dan Ekowati [10] menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Ristiyana *et al*. [11]

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hidayat dan Maulana [12] menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Mantirri *et al*. [13] memperoleh hasil bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Inkonsistensi hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks dan wilayah yang berbeda.

Berdasarkan fenomena tingginya jumlah kendaraan berstatus BDU serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran PKB di Jakarta Timur. Penelitian ini membahas wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Timur, yang merupakan salah satu daerah dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat, tetapi menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran PKB yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan, keadilan pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pembayaran PKB di Jakarta Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi untuk pengembangan penelitian perpajakan daerah serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, keadilan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jakarta Timur. Subjek penelitian adalah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua yang berdomisili di Jakarta Timur serta pernah atau sedang melakukan pembayaran PKB. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel minimum yang diperlukan sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan 104 responden yang memenuhi kriteria penelitian sebagai sampel analisis. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan *Google Form*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan publikasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin, yaitu skor 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skor 5 (Sangat Setuju). Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1), Keadilan Pajak (X_2), dan Kesadaran Pajak (X_3), serta satu variabel dependen yaitu Kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Sumber
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1)	Efisiensi dan efektivitas	Kecepatan pelayanan pembayaran PKB, efisiensi waktu dan biaya, peningkatan kualitas pelayanan	Likert (1-5)	[14]
	Kemudahan adminisstrasi	Kemudahan memahami prosedur, penggunaan e-Samsat, kesederhanaan administrasi		
	Aksesibilitas layanan	Kemudahan akses layanan, ketersediaan metode pembayaran, keterjangkauan fasilitas		
	Keakuratan dan Transparansi Informasi	Kejelasan informasi, keakuratan informasi, kemudahan memperoleh informasi		
Keadilan Pajak (X_2)	Keadilan horizontal	Kesesuaian besaran PKB, perlakuan yang sama bagi kendaraan sejenis, tidak diskriminatif	Likert (1-5)	[10]
	Keadilan vertikal	Besaran PKB sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak		
Kesadaran Pajak (X_3)	Pengetahuan perpajakan	Pemahaman ketentuan perpajakan dan konsekuensi ketidakpatuhan	Likert (1-5)	[12]
	Kesadaran sebagai warga negara	Kesadaran pajak sebagai kontribusi pembangunan dan tanggung jawab warga negara		
	Kemauan membayar pajak	Kesediaan membayar pajak secara sukarela dan tidak menunda pembayaran		
Kepatuhan Pembayaran PKB (Y)	Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan	Mematuhi ketentuan PKB, membayar sesuai ketetapan, tetap patuh tanpa pengawasan	Likert (1-5)	[14]
	Ketepatan waktu pembayaran	Membayar PKB tepat waktu		
	Pelunasan kewajiban pajak	Tidak memiliki tunggakan dan memenuhi kewajiban pembayaran secara rutin		
	Kepatuhan terhadap sanksi perpajakan	Memenuhi kewajibann pembayaran PKB untuk menghindari sanksi		

Sumber: Data diolah (2026)

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27. Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dengan membandingkan nilai *Pearson Correlation* (r_{hitung}) terhadap r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% serta uji reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dengan kriteria > 0,60. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirmov (Sig. > 0,05), uji multikolinearitas berdasarkan niai *Tolerance* > 0,10 dan *Cariance Inflation Factor* (VIF) < 10, serta uji heteroskedastisitas menggunakan uji korelasi *Spearman's Rho* dengan nilai signifikansi > 0,05.

Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dianalisis menggunakan regresi linear berganda [15] dengan model sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut, Y merupakan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), α merupakan konstanta, β_1, β_2, dan β_3 merupakan koefisien regresi, X_1 merupakan modernisasi sistem administrasi perpajakan, X_2 merupakan keadilan pajak, X_3 merupakan kesadaran pajak, sedangkan ε merupakan galat (*error*). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk menguji pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen, uji f untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan, serta koefisien determinasi (*Adjusted* R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variais kepatuuhan pembayaran PKB, dengan Tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun hipotesisnya:
H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
H2: Keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
H3: Kesadaran pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
H4: Modernisasi sistem administrasi perpajakan, keadilan pajak, dan kesadaran pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner secaradaring kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Jakarta Timur melalui *Google Forms*. Hasil penguumpulan data menunjukkan bahwa sebanyak 104 responden yang memenuhi kriteria penelitian dan digunakan sebagai sampel akhir. Dalam penelitian ini, karakteristik responden pada penelitian ini dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan utama, dan kecamatan domisili. Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri dari 54 laki-laki (51,9%) dan 50 perempuan (48,1%). Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 17-25 tahun sebanyak 59 responden (56,7%). Berdasarkan pekerjaan utama, responden didominasi oleh mahasiswa/pelajar sebanyak 50 responden (48,1%). Selain itu, responden berasal dari berbagai kecamatan di Jakarta Timur dengan jumlah terbanyak berasal dari Kecamatan Cipayung.

Sebelum dilakukan analisis regresi, untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan mampu mengukur variabel penelitian, perlu dilakukan pengujian instrumen. Pengujian instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 27. Uji validitas digunakan dalam menilai sejauh mana ketepatan dan ketelitian data yang dihasilkan dala mengukur variabel yang diteliti [16]. Uji validitas dilakukan dengan melakukan perbandingan antara nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%. Dengan jumlah responden uji coba sebanyak 30 responden, diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,3610. Instrumen penelitian dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel}. Berikut hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,837	0,3610	Valid
	X1.2	0,871	0,3610	Valid
	X1.3	0,896	0,3610	Valid
	X1.4	0,908	0,3610	Valid
	X1.5	0,912	0,3610	Valid
	X1.6	0,906	0,3610	Valid
	X1.7	0,905	0,3610	Valid
	X1.8	0,839	0,3610	Valid
	X1.9	0,918	0,3610	Valid
	X1.10	0,860	0,3610	Valid
	X1.11	0,929	0,3610	Valid
	X1.12	0,860	0,3610	Valid
Keadilan Pajak (X2)	X2.1	0,864	0,3610	Valid
	X2.2	0,866	0,3610	Valid

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

	X2.3	0,895	0,3610	Valid
	X2.4	0,762	0,3610	Valid
	X2.5	0,869	0,3610	Valid
	X2.6	0,802	0,3610	Valid
Kesadaran Pajak (X3)	X3.1	0,884	0,3610	Valid
	X3.2	0,916	0,3610	Valid
	X3.3	0,822	0,3610	Valid
	X3.4	0,886	0,3610	Valid
	X3.5	0,933	0,3610	Valid
	X3.6	0,929	0,3610	Valid
Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y1	0,939	0,3610	Valid
	Y2	0,895	0,3610	Valid
	Y3	0,854	0,3610	Valid
	Y4	0,713	0,3610	Valid
	Y5	0,885	0,3610	Valid
	Y6	0,862	0,3610	Valid
	Y7	0,866	0,3610	Valid

Sumber: IBM SPSS versi 27, data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3, seluruh indikator pada setiap variabel penelitian memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,3610. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid dan mampu mengukur variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Keadilan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Pembayaran PKB.

Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian [16]. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Standart	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0,975	0,6	Reliabel
Keadilan Pajak (X2)	0,918	0,6	Reliabel
Kesadaran Pajak (X3)	0,949	0,6	Reliabel
Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,939	0,6	Reliabel

Sumber: IBM SPSS versi 27, data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,060. Hal tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Setelah instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi statistik sehingga layak digunakan dalam analisis regresi linear berganda [17]. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Asymp. Sig*. (2-tailed) sebesar 0,096, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual dalam model regresi telah berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Hasil uji normalitas disajikan pada Gambar 1.

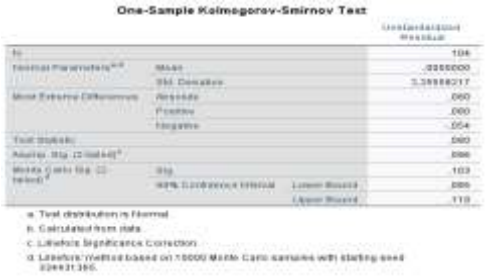

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov*)
Sumber: *Output* IBM SPSS versi 27

Selain itu, hasil uji normalitas juga didukung oleh *Normal Probability Plot* pada Gambar 2. Grafik tersebut menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

sehingga mengindikasikan bahwa data telah berdistribusi normal dan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya [17].

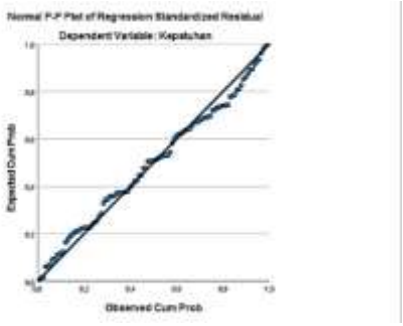

Gambar 2. Grafik *Normal Probability Plot* (NP-Plot)
Sumber: *Output* IBM SPSS versi 27

Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi. Hasil penngujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	*Collinearity Statistics*	
	Tolerance	*VIF*
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0.757	1.322
Keadilan Pajak	0.541	1.850
Kesadaran Pajak	0.644	1.553

Sumber: IBM SPSS versi 27, data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,010 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas sehingga masing-maisng variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dalam analisis regresi linear berganda [17].

Selanjutnya, dilakukan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Hasil pengujian melalui grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hasil *scatterplot* disajikan pada Gambar 3.

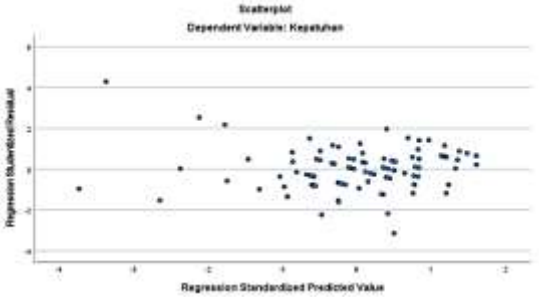

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)
Sumber: *Output* IBM SPSS versi 27

Setelah itu, hasil uji heteroskedastisitas juga dikonfirmasi menggunakan korelasi *Spearman's rho*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,825; Keadilan Pajak sebesar 0,807; dan Kesadaran Pajak sebesar 0,324; yang seluruhnya > 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Gambar 4.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)



Correlations

			Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Keadilan Pajak	Kesadaran Pajak	ABS_RES
Spearman's rho	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Correlation Coefficient	1,000	,595**	,280**	-,023
		Sig. (2-tailed)	.	<,001	<,001	,829
		N	104	104	104	104
	Keadilan Pajak	Correlation Coefficient	,595**	1,000	,015**	-,024
		Sig. (2-tailed)	<,001	.	<,001	,807
		N	104	104	104	104
	Kesadaran Pajak	Correlation Coefficient	,280**	,015**	1,000	-,058
		Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	.	,324
		N	104	104	104	104
	ABS_RES	Correlation Coefficient	-,023	-,024	-,058	1,000
		Sig. (2-tailed)	,829	,807	,324	.
		N	104	104	104	104

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Spearman's Rho*)
Sumber: *Output* IBM SPSS versi 27

Berdasarkan hasil tersebut, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas [15].

Setelah model regresi memenuhi seluruh asumsi klasik, selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), Keadilan Pajak (X2), dan Kesadaran Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Gambar 5.

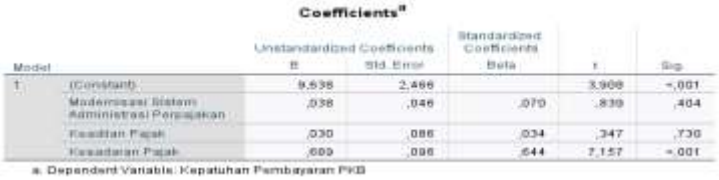

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9,638	2,466		3,908	<,001
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	,038	,046	,070	,839	,404
	Keadilan Pajak	,030	,086	,034	,347	,730
	Kesadaran Pajak	,689	,096	,644	7,157	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran PKB

Gambar 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Sumber: *Output* IBM SPSS versi 27

Berdasarkan Gambar 5, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + 0{,}038X1 + 0{,}030X2 + 0{,}689X3 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki arah hubungan positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel Kesadaran Pajak memiliki koefisien regresi terbesar (0,689), sedangkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Keadilan Pajak masing-masing memiliki koefisien sebesar 0,038 dan 0,030.

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Kesadaran Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Pembayaran PKB, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji T

Variabel Independen (X)	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0,839	1,98397	0,404	Tidak berpengaruh
Keadilan Pajak (X2)	0,347	1,98397	0,730	Tidak berpengaruh
Kesadaran Pajak (X3)	7,157	1,98397	< 0,001	Berpengaruh

Sumber: IBM SPSS versi 27, data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 9, variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,404 (>0,05) dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,839, sehingga tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel Keadilan Pajak juga tidak berpengaruh, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,730 (>0,05) dan nilai t_{hitung} sebesar 0,347. Sebaliknya, variabel Kesadaran Pajak memiliki nilai signifikansi <0,001 (<0,005) dengan nilai t_{hitung} sebesar 7,157, sehingga berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil uji simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 30,509 dengan tingkat signifikansi <0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Kesadaran Pajak secara

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selanjutnya, kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen diukur melalui koefisien determminasi (*Adjusted* R^2), sebagaimana disajikan pada Gambar.

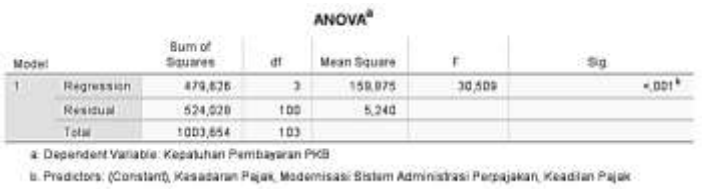

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	479,626	3	159,875	30,509	<,001[b]
	Residual	524,028	100	5,240		
	Total	1003,654	103			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran PKB

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Keadilan Pajak

Gambar 6. Hasil Uji F
Sumber: *Output* IBM SPSS versi 27

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,462, yang berarti Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Kesadaran Pajak mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor sebesar 46,2% , sedangkan sisanya sebesar 53,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variasi kepatuhan pembayaran PKB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, bukan kemudahan layanan perpajakan yang ditawarkan oleh e-Samsat, Gerai Samsat, Samsat Keliling, dan Samsat *Drive Thru*.. Meskipun berbagai inovasi layanan telah mempermudah proses pembayaran pajak, keberadaan sistem administrasi yang modern belum secara otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan dalam melakukan suatu tindakan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tersebut belum cukup kuat untuk membentuk perilaku patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lim dan Febriany [9] yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan penelitian Putri dan Rosyati [8] yang menemukan adanya pengaruh signifikan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan dalam sistem perpajakan belum menjadi faktor utama yang menentukan kepatuhan pembayaran PKB. Dengan kata lain, keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tidak semata-mata dipengaruhi oleh penilaian terhadap keadilan beban pajak maupun kesetaraan perlakuan dalam sistem perpajakan.

Dalam perspektif TPB, keadilan pajak berkaitan dengan komponen *attitude*, yaitu penilaian individu terhadap suatu perilaku. Meskipun wajib pajak memiliki persepsi bahwa sistem perpajakan telah diterapkan secara adil, persepsi tersebut belum cukup mampu mendorong terbentuknya perilaku patuh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ristiyana *et al* [11] yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan kedua variabel sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan yang berasal dari dalam diri wajib pajak menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan faktor pelayanan maupun persepsi keadilan. Temuan tersebut sesuai dengan TPB. Kesadaran pajak berkaitan dengan komponen *attitude* yang membentuk niat seseorang untuk berperilaku. Wajib pajak yang memahami manfaat pajak bagi pembangunan akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap pembayaran pajak sehingga lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Maulana [12] serta Putri dan Rosyati [8] yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

saling melengkapi. Meskipun secara parsial modernisasi sistem administrasi perpajakan dan keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan, keberadaan kedua variabel tersebut tetap memberikan kontribusi ketika dianalisis secara bersama-sama dengan kesadaran pajak.

Temuan tersebut juga mendukung TPB yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh kombinasi *attitude, subjective norms*, dan *perceived behavioral control*. Dalam penelitian ini, modernisasi sistem administrasi perpajakan mempresentasikan *perceived behavioral control*, sedangkan keadilan pajak dan kesadaran pajak berkaitan dengan *attitude*. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pembayaran PKB tidak cukup hanya melalui penyediaan layanan yang modern, tetapi juga perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran wajib pajak serta penerapan sistem perpajakan yang adil sehingga mampu mendorong kepatuhan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, keadilan pajak, dan kesadaran pajak secara simultan beerpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jakarta Timur. Secara parsial, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PKB, sedangkan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan sebesar 46,2% variasi kepatuhan pembayaran PKB, sedangkan 53,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pembayaran PKB tidak hanya memerlukan penyediaan layanan administrasi perpajakan yang semakin modern dan penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan, tetapi juga perlu diimbangi dengan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pembayaran PKB melalui penguatan edukasi perpajakan, optimalisasi pelayanan, dan penyempurnaan kebijakan perpajakan.

Referensi

[1] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Realisasi Sementara APBN 2025, Menkeu Purbaya: APBN Tunjukkan Kinerja yang Solid,” 2026. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Sementara-APBN-2025.

[2] R. D. Saptoyo and B. Galih, “Jumlah Kendaraan di Indonesia, Sepeda Motor Mencapai 157 Juta Unit,” *Kompas.com*, 2025. https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/03/26/132200282/jumlah-kendaraan-di-indonesia-sepeda-motor-mencapai-157-juta-unit.

[3] A. Arrosyid and ; Eko Priyojadmiko, “Analisis pengaruh sikap, norma subjektif kontrol perilaku dengan religiusitas dan niat sebagai variabel moderasi terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat,” *Quranomic J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 16–17, 2022.

[4] I. Pontoh, M. Kesek, R. B. Takakobi, S. S. Sonu, and G. P. Wenur, “Big Data and Business Intelligence in the Public Sector: Implementation and Benefits,” *J. Akunt. Aktual*, vol. 12, no. 1, pp. 27–47, 2025.

[5] A. R. Amalia and S. Anwar, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan,” *Equilib. J. Ilm. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 12, no. 2, p. 247, 2023, doi: 10.35906/equili.v12i2.1580.

[6] B. A. Nugaha and A. Hajanirina, “Taxpayers’ Perception of Tax Evasion Studied From Tax Knowledge, Tax Fairness, and Tax Dicrimination,” *Res. Manag. Account.*, vol. 3, no. 1, pp. 43–51, 2020, doi: 10.33508/rima.v3i1.2747.

[7] V. A. A. Kowel, L. Kalangi, and S. J. Tangkuman, “the Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness and Modernization of Tax Administration System To Taxpayer Compliance of Motor Vehicles in South Minahasa Regency,” *J. EMBA*, vol. 7, no. 3, pp. 4251–4260, 2019.

[8] A. M. Putri and T. Rosyati, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Samsat Kota Depok 1),” *urnal Nusa Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 25–48, 2025.

[9] V. F. Lim and N. Febriany, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Palembang.,” *J. Inf. Akunt.*, vol. 1, no. 3, pp. 43–62, 2022.

[10] Faturrahman and L. Ekowati, “Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *JEKOS (Jurnal Ekon. Dan Sos.*, vol. 3, no. 2, pp. 28–41, 2025.

[11] R. Ristiyani, A. S. Atichasari, and F. S. Andini, “TAXPAYER COMPLIANCE: SUBJECTIVE NORMS, PERCEPTIONS OF BEHAVIORAL CONTROL, PUBLIC TRUST, PERCEPTIONS OF TAX FAIRNESS, AND INTENT TO COMPLY.,” *Jramb*, vol. 8, no. 1, pp. 91–102, 2022.

[12] I. Hidayat and L. Maulana, “Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang,” *Bongaya J. Res. Account.*, vol. 1, no. April, pp. 11–35, 2022.

[13] E. Mantirri , C. Pagiu, and A. C. Rambulangi, “Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Tana Toraja).,” *J. Neraca Perad.*, vol. 4, no. 28, pp. 139–142, 2024.

[14] P. A. Virgiawati, Samin, and D. J. Kirana, “(Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan) Universitas Pembangunan Nasional ‘ Veteran ’ Jakarta,” *J. MONEX*, vol. 8, no. 2, 2019.

[15] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.

[16] Sugiyono, “Metode Penelitian kuantitatif kualitatif.” Alfabeta, Bandung, p. 1, 2020.

[17] I. Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25,” *Semarang Badan Penerbit Univ. Diponegoro*, 2018.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)